

ANTISIPASI DAMPAK KRISIS KEUANGAN TURKI

Hilma Meilani

19

Abstrak

Krisis keuangan yang terjadi di Turki turut memberikan dampak bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pelemahan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjadi akibat sentimen negatif dari eksternal berupa gejolak perekonomian Turki dan internal berupa defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan Indonesia yang masih tinggi membuat rupiah dan ekonomi Indonesia rentan terhadap gejolak eksternal. Pemerintah Indonesia harus mengantisipasi dampak dari krisis keuangan Turki dengan melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dan mengatasi defisit transaksi berjalan untuk meningkatkan kepercayaan investor, serta meningkatkan cadangan devisa. DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan revisi UU No. 24 Tahun 1999 untuk optimalisasi penerimaan devisa dari hasil ekspor dan manajemen sistem lalu lintas devisa yang menguntungkan bagi kepentingan Nasional.

Pendahuluan

Pada tanggal 13 Agustus 2018 mata uang lira Turki menyentuh level terendahnya sepanjang sejarah di posisi 7,24 lira per USD. Walaupun Turki hanya menyumbang persentase kecil terhadap perekonomian dan pasar keuangan global, melemahnya mata uang lira telah menimbulkan kekhawatiran adanya krisis ekonomi yang bisa merambat ke negara-negara berkembang lainnya maupun sistem perbankan di Eropa.

Ada tiga hal yang menjadi pemicu krisis di Turki. *Pertama*, ketegangan diplomatik antara Turki dengan Amerika Serikat (AS) yang berawal dari tekanan Presiden AS

Donald Trump agar Pemerintah Turki membebaskan warga AS, Andrew Brunson karena dianggap sebagai salah satu pendukung upaya kudeta terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tahun 2016. *Kedua*, sengketa politik tersebut merambat menjadi sengketa ekonomi. Presiden AS memerintahkan pengenaan tarif impor 20% untuk aluminium dan tarif 50% untuk baja dari Turki, di mana sekitar 62% ekspor baja Turki ditujukan ke AS. *Ketiga*, kondisi ekonomi Turki makin rentan akibat besarnya utang pemerintah maupun utang swasta dalam bentuk USD. Pada kuartal I-2018, total utang luar negeri Turki mencapai USD466,7



miliar. Menurut *International Monetary Fund* (IMF) rasio utang pemerintah Turki terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sangat tinggi, yaitu 50%. Per Juli 2018, Turki mengalami inflasi sangat tinggi, yaitu 16%, namun bank sentral tidak dapat leluasa menaikkan tingkat bunga acuan karena Presiden Turki memerintahkan perbankan menjaga suku bunga tetap rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Kontan, 20 Agustus 2018).

Krisis yang terjadi di Turki dapat memberikan dampak bagi negara-negara berkembang dengan transmisi melalui pasar uang dan pasar modal dimana terjadi penurunan likuiditas USD di seluruh dunia akibat penarikan kembali modal investor atau terjadi *capital outflow*. Krisis Turki dikhawatirkan akan memberikan sentimen negatif bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Defisit transaksi berjalan Indonesia yang membesar dipersepsikan oleh investor sebagai negara yang semakin membutuhkan dana asing untuk menutup kebutuhan valuta asingnya sehingga semakin rentan akan volatilitas keluar masuk dana asing. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pembahasan ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah dalam mengantisipasi dampak krisis keuangan Turki dan meningkatkan cadangan devisa Indonesia untuk mengatasi defisit transaksi berjalan dan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap USD.

Perbandingan Indikator Ekonomi Indonesia dan Turki

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia berbeda dengan Turki yang tengah dilanda krisis ekonomi (www.antaranews.com, 13 Agustus 2018). Perbandingan ekonomi Turki dengan Indonesia dapat dilihat di Tabel 1.

Indonesia mempunyai kemiripan dengan Turki yaitu berstatus sebagai negara berkembang, utang luar negeri cukup besar, dan mengalami defisit neraca transaksi berjalan. Perbedaannya adalah fundamental ekonomi Indonesia dinilai lebih kuat daripada Turki, di mana inflasi Indonesia per Juli 2018 sebesar 3,2%, sementara inflasi Turki 15,6%, dan suku bunga acuan bank sentral Indonesia 5,5% dibanding Turki 17,75%. Lemahnya independensi bank sentral Turki

Tabel 1. Perbandingan Ekonomi Turki dengan Indonesia

Data Ekonomi	Turki	Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi (Q2-2018), y-o-y	7,22%	5,27%
Utang Pemerintah (Q1-2018)	USD466,7 miliar	USD358,7 miliar
Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB (Q1-2018)	50,0%	29,78%
Inflasi (Juli 2018)	15,6%	3,2%
Nilai Tukar terhadap USD (year to date)	-40%	-7,04%
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (Q2-2018)	-6,1%	-3,0%
Suku bunga acuan bank sentral (Juli 2018)	17,75%	5,5%

Sumber: Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Central Bank of the Republic of Turkey, diolah.

akibat intervensi Pemerintah terhadap bank sentral untuk tetap menahan suku bunga demi menunjang pertumbuhan ekonomi walaupun angka inflasi sangat tinggi semakin memperburuk krisis keuangan di Turki, sementara bank sentral Indonesia lebih independen. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan nilai perdagangan Indonesia dengan Turki tahun 2017 sekitar US\$ 1,7 miliar, hanya sekitar 1% dari total nilai perdagangan internasional Indonesia, namun Pemerintah perlu mengantisipasi dampak krisis Turki karena turut memberikan imbas pada nilai tukar dan IHSG.

Dampak terhadap Nilai Tukar Rupiah dan IHSG

Pada tanggal 13 Agustus 2018 IHSG turun 3,55% dari level 6000-an menjadi 5.861,246, dan nilai tukar rupiah melemah 0,90% ke level Rp14.608 per USD, terendah sepanjang 2018. Di tengah krisis Turki, asing lebih waspada dengan memindahkan dananya dari *emerging market* ke negara maju, dan investor mengalihkan portofolio ke aset kurang berisiko, sehingga posisi *net sell* asing mencapai Rp3,193 triliun sejak data CAD kuartal II 2018 dirilis dan sejak dimulainya krisis mata uang Turki pada tanggal 16 Agustus 2018.

Pelemahan rupiah dan IHSG selain akibat sentimen negatif dari eksternal berupa krisis Turki, juga akibat internal berupa defisit transaksi berjalan. Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan (CAD) triwulan II 2018 melebar menjadi USD8,03 miliar atau 3,04% dari PDB yang dipengaruhi oleh penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah kenaikan defisit neraca perdagangan migas.

Posisi cadangan devisa Indonesia per Juni 2018 menjadi USD119,84 miliar, setara dengan pembiayaan 6,9 bulan impor. Angka ini masih di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Akhir Juli 2018, cadangan devisa Indonesia sebesar USD118,31 miliar, atau turun sekitar USD1,5 miliar yang digunakan untuk intervensi rupiah. Hal ini menunjukkan sejak awal tahun, cadangan devisa telah menurun sebesar USD13,67 miliar, atau rata-rata sebesar USD1,95 miliar perbulan.

Upaya Antisipasi Dampak Krisis Turki

Untuk memperkuat strategi operasi moneter, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5%. Operasi moneter BI dengan mengintervensi pasar tersebut mengakibatkan turunnya cadangan devisa. Strategi kebijakan Pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa Negara antara lain: percepatan pelaksanaan kebijakan pencampuran CPO ke solar sebesar 20% (B20) untuk menekan impor BBM, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) terutama untuk BUMN besar, pengendalian impor, dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata. Untuk pengendalian impor, Pemerintah akan mengenakan tarif Pph impor 7,5% terhadap barang yang memiliki substitusi impor dalam negeri dan bukan termasuk barang yang strategis. (Kompas, 15 Agustus 2018).

Pariwisata Indonesia mempunyai potensi besar sebagai sumber devisa, dalam *Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) World Economic Forum (WEF) tahun 2017* Indonesia berada di peringkat 42 dari

136 negara (www.weforum.org). Penyediaan infrastruktur pariwisata perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing kawasan wisata (www.neraca.co.id, 13 Agustus 2018). Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur (jalan, air, teknologi informasi dan komunikasi/ TIK, pelabuhan, bandara) menjadi determinan utama dalam menarik wisatawan (Seetanah, et.al, 2011).

Langkah yang dapat dilakukan Pemerintah dalam jangka pendek adalah menambah pasokan valuta asing (valas) dan mengonversi Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke rupiah. BI mencatat DHE yang dikonversi ke rupiah hanya berkisar 15-25% dari jumlah DHE yang kembali ke Indonesia, dan jumlah DHE yang kembali ke Indonesia baru 90% dari total DHE. Dalam PBI No. 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, eksportir tidak diberi kewajiban untuk mengonversi ke DHE ke dalam rupiah. (CNN Indonesia, 21 Agustus 2018). Pasal 2 ayat 1 UU No. 24 Tahun 1994 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar menyebutkan setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Pengamat Ekonomi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aviliani mengatakan aturan devisa di Indonesia masih lemah karena tidak ada aturan yang mengikat kapan devisa yang masuk dapat keluar kembali dari Indonesia. Beberapa negara ASEAN menerapkan sistem devisa yang lebih terkontrol, di Malaysia valas yang masuk minimal harus disimpan di bank selama 6 bulan, dan di Thailand, DHE wajib dikonversi ke Thai Baht. (www.kompas.com, 13 Agustus 2018).

Salah satu cara untuk memantau arus DHE adalah mewajibkan para

eksportir untuk menempatkan DHE di rekening khusus di bank devisa. Keuntungan pemisahan rekening khusus DHE adalah bank sentral dapat secara langsung memantau aktivitas valas yang dihasilkan dari pendapatan ekspor, berapa lama dana tersebut disimpan di bank domestik, di mana eksportir melakukan transfer devisa dan tujuannya.

Perlu ada insentif khusus diberikan kepada rekening khusus DHE yang dikonversi ke dalam rupiah dengan cara memberikan tingkat bunga khusus. Pemerintah telah memberikan fasilitas fiskal kepada eksportir yang menyimpan DHE dalam deposito rupiah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/2016 berupa pemotongan pajak penghasilan (PPH) atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), namun banyak eksportir yang belum mengetahui tentang insentif tersebut karena kurangnya sosialisasi sehingga kurang efektif (<http://finansial.bisnis.com>, 13 Agustus 2018).

Diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, antara lain menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan menambah aturan jangka waktu penyimpanan DHE di dalam negeri, karena jika menunggu revisi UU No. 24 Tahun 1999 akan terlalu lama. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 menyebutkan ada tiga syarat "kegentingan yang memaksa" sehingga Perpu diperlukan: (1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang (UU); (2) UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan

hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai; dan (3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Penerapan sistem devisa bebas perlu ditopang dengan perangkat kebijakan perekonomian yang kuat dan efisien. DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan UU perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan revisi UU No. 24 Tahun 1999 untuk optimalisasi penerimaan devisa dari hasil ekspor dan manajemen sistem lalu lintas devisa yang menguntungkan bagi kepentingan Nasional.

Penutup

Krisis keuangan Turki turut berdampak pada negara-negara *emerging market*, termasuk Indonesia. Pelemahan IHSG dan nilai tukar rupiah terjadi akibat sentimen negatif dari eksternal berupa gejolak perekonomian Turki dan internal berupa defisit transaksi berjalan. Pemerintah harus melakukan upaya stabilisasi nilai rupiah dan memperkuat cadangan devisa untuk meningkatkan kepercayaan investor serta mengantisipasi dampak krisis keuangan Turki.

Upaya yang dilakukan Pemerintah antara lain menaikkan suku bunga acuan BI, meningkatkan pasokan valas ke dalam negeri, memberikan insentif untuk mengkonversi DHE ke rupiah, menerapkan kebijakan B20, mengendalikan impor, menerapkan aturan TKDN, dan meningkatkan infrastruktur pariwisata. Kebijakan Pemerintah tersebut harus mendapatkan pengawasan oleh DPR RI, khususnya Komisi XI, untuk memastikan bahwa Pemerintah dapat menjaga stabilitas

nilai tukar rupiah pada nilai yang wajar, inflasi yang rendah, dan defisit transaksi berjalan yang aman. DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU perlu mendorong Pemerintah melakukan revisi UU No.24 Tahun 1999 untuk optimalisasi penerimaan DHE.

Referensi

- “BI Sebut Hanya 20 Persen Devisa Hasil Ekspor Ditukar Rupiah”, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180727183802-532-317562/bi-sebut-hanya-20-persen-devisa-hasil-ekspor-ditukar-rupiah>, diakses 21 Agustus 2018.
- “Devisa Hasil Ekspor Tak Bertahan Lama di Indonesia Karena Peraturan Terlalu Lemah”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/08/063200326/devisa-hasil-ekspor-tak-bertahan-lama-di-indonesia-karena-peraturan-terlalu-lemah>, diakses 20 Agustus 2018.
- “Hadapi Dampak Krisis Ekonomi Turki Presiden Jokowi Minta Menteri Siap Siaga”, <http://www.neraca.co.id/article/104921/hadapi-dampak-krisis-ekonomi-turki-presiden-jokowi-minta-menteri-siap-siaga>, diakses 15 Agustus 2018.
- “Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Realisasi Triwulan II 2018”, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/neraca-pembayaran/Pages/npitw218.aspx>, diakses 13 Agustus 2018.
- “Mata Uang Turki Anjlok, Adakah Imbasnya Ke Rupiah?”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/13/052100626/mata-uang-turki-anjlok-adakah-imbasnya-ke-rupiah>, diakses 13 Agustus 2018.
- “Pajak Impor 7,5 Persen”, *Kompas*, Rabu 15 Agustus 2018, hal. 13.
- “Pemerintah Mulai Evaluasi Insentif Devisa Hasil Ekspor”, <http://finansial.bisnis.com/read/20180814/9/827893/>

pemerintah-mulai-evaluasi-insentif-devisa-hasil-ekspor, diakses 20 Agustus 2018.

“Peningkatan Defisit Transaksi Berjalan Bakal Pengaruhi Rupiah”, *Koran Jakarta*, Senin 13 Agustus 2018, hal. 1.

Seetanah, et.al, 2011, “Does Infrastructur Matter In Tourism Development?”, *University of Mauritius Research Journal*, Vol. 17.

“Sri Mulyani Jelaskan Kondisi Indonesia Berbeda dengan Turki”, <https://www.antaraneews.com/berita/736501/sri-mulyani-jelaskan-kondisi-indonesia-berbeda-dengan-turki>, diakses 13 Agustus 2018.

“Strategi Menahan Efek Domino Turki”, *Tabloid Kontan*, Senin 20 Agustus 2018, hal. 4.

“Volatilitas Pasar Momentum Koleksi Saham”, *Bisnis Indonesia*, Selasa 14 Agustus 2018, hal. 1.



Hilma Meilani
hilma.meilani@dpr.go.id

Hilma Meilani, S.T., MBA., menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002, pendidikan S2 jurusan Finance pada Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Kebijakan Ekonomi pada bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah" (2013), "Desentralisasi Fiskal dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (2014)", dan "Peran Kebijakan Persaingan Usaha untuk Meningkatkan Efisiensi menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) (2015)".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.